BAB III
RENCANA KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut:

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu

proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Terdapat beberapa indikator makro ekonomi yaitu sebagai berikut.

a. **Laju Pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan pendapatan nasional yang tercemin pada nilai PDRB dari tahun ke tahun. Indikator yang lazim digunakan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi riil adalah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan yang menjadi petunjuk dari kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan percepatan pembangunan di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi baik agregat maupun sektoral dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku belum menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan yang riil, karena masih dipengaruhi kenaikan tingkat harga atau inflasi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2008 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,05 persen, naik menjadi 6,38 persen di Tahun 2009 dan turun menjadi 6,25 persen pada Tahun 2010, Tahun 2011 meningkat mencapai 6,41 persen sementara untuk Tahun 2012 meningkat menjadi 6,54 dan ditahun 2013 diperkirakan mencapai 6,60 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh

beberapa sektor perekonomian yang semakin berkembang pesat. Sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang paling besar pada Tahun 2013 yaitu kontruksi/bangunan. Tingginya pertumbuhan sektor bangunan/ kontruksi ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan infrastruktur guna untuk mempercepat pembangunan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu prioritas pembangunan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya sektor yang memberi andil terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian (pertambangan migas, pertambangan non migas dan penggalian). Diikuti dengan sektor lainnya seperti sektor angkutan dan komunikasi sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.

b. Laju inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi. Jika inflasi terlalu tinggi maka daya beli masyarakat akan menurun yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Secara umum laju inflasi nasional Maret 2015 sebesar 0,17 persen. Namun sesuai dengan kondisi real yang terjadi di lapangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2015 di Kabupaten Natuna terjadi inflasi sebesar 0,04 persen, sedangkan dua daerah tingkat dua lainnya di Provinsi Kepulauan Riau mengalami deflasi yaitu Kota Batam sebesar -0,67 persen dan kota Tanjungpinang sebesar -0,45 persen. Inflasi di Kabupaten Natuna

disebabkan oleh naiknya indeks harga kelompok pengeluaran makanan jadi sebesar 0,59 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar sebesar 1,80 persen; kelompok sandang sebesar 0,13 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,67 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,65 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami kenaikan indeks sebesar 1,88 persen. Sedangkan penurunan indeks harga Kabupaten Natuna terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar -3,68 persen. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Maret) 2015 di Kabupaten Natuna sebesar 0,36 persen. Laju inflasi *'year on year'* Kabupaten Natuna sebesar 6,35 persen.

Tabel.T-III.1

Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna TA. 2016

No	Indikator	2014	2015	2016
1	PDRB ADHB (jutaan rupiah)	1.941.574,00	2.189.124,685	2.468.238,08
2	PDRB ADHK (jutaan rupiah)	552.530,00	685.626,547	620.705,57
3	LPE	6,07%	6,13 %	6,19 %
4	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	26.426.759	29.203.905	32.272.987
5	PDRB perkapita ADHK (rupiah)	7.520.482	7.812.521	8.115.920

Sumber: Badan Pusat Statistik 2013

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Harga dan Lifting Minyak

Pemulihan ekonomi dunia yang terus berlangsung sejak Tahun 2010 akan memicu tingginya permintaan minyak dunia pada Tahun 2013. Di sisi lain, persediaan dan distribusi minyak dunia diperkirakan akan cenderung stabil yang diikuti dengan tingginya tingkat kedisiplinan negara anggota OPEC untuk menjaga kapasitas produksi minyak. Menurut Badan Energi Amerika (EIA), rata-rata harga minyak WTI dan Brent pada tahun 2013 masing-masing diperkirakan mencapai sekitar US$88,5 per barel dan US$98,3 per barel, sedikit lebih rendah dari perkiraan tahun 2012, yaitu masing-masing sebesar US$92,8 per barel dan US$106,3 per barel. Tingginya perkiraan tersebut, antara lain didukung oleh proyeksi pertumbuhan permintaan dan melambatnya pertumbuhan pasokan dari negara-negara non-OPEC. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, perkiraan harga minyak ICP tahun 2013 mencapai sekitar US$100 per barel. Salah satu variabel yang digunakan dalam memperhitungkan penerimaan migas selama ini adalah *lifting* minyak bumi. Pada kenyataannya, penerimaan migas Indonesia juga ditentukan oleh *lifting* gas bumi. Dengan memperhatikan tantangan yang terdapat pada kapasitas produksi dan *lifting* minyak mentah Indonesia, Pemerintah bermaksud mengusulkan variabel asumsi tambahan pada tahun 2013 untuk mengimbangi potensi penurunan penerimaan sumber daya alam yang bersumber dari minyak mentah, yaitu sumber daya gas bumi. Pilihan sumber daya gas bumi tersebut antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia merupakan salah satu eksportir gas terbesar, keberadaan gas yang cukup penting sebagai sumber energi alternatif minyak bumi, serta upaya-upaya untuk mengoptimalkan konsumsi energi gas di dalam negeri. Berbeda dengan cadangan minyak bumi yang terus menipis, cadangan gas bumi Indonesia masih cukup besar. Berdasarkan data tahun 2010, total cadangan gas Indonesia diperkirakan mencapai 157,14 triliun standar kaki kubik (*trillion standard cubic feet*/tscf) atau sekitar 3,0 persen dari cadangan gas dunia, yang terdiri atas cadangan terbukti 108,4 tscf dan

cadangan potensial 48,74 tscf. Di lain pihak, *lifting* minyak bumi di tahun 2013 diperkirakan mencapai 900 ribu barel per hari. Dengan dengan demikian, secara kumulatif, *lifting* minyak dan gas bumi pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 2.260 ribu barel.

Tabel.T-III.2

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2015.

PENGELUARAN	***TAHUN 2013 (%)***
Konsumsi Masyarakat	5,1
Konsumsi Pemerintah	4,5
PMTB (Investasi)	8,5
Ekspor	2,2
Dikurangi Impor	1,6
PDB	5,7

Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2015.

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna menunjukkan tren kecendrungan meningkat setiap tahunnya. Besaran nilai PDRB dapat menentukan struktur perekonomian suatu daerah. Struktur perekonomian tersebut menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi, dengan mengamati struktur perekonomian akan tampak seberapa besar kekuatan ekonomi suatu negara atau daerah. Indikator makro semacam ini sangat penting bagi pengambilan keputusan untuk menentukan arah dan sasaran kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam

menciptakan nilai tambah. Hal tersebut juga menunjukkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap sektor ekonominya. Makin besar nilai tambah yang dapat diraih oleh suatu sektor maka semakin besarlah peranannya dalam perekonomian daerah tersebut. Besaran peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut.

Tabel. T-III.3

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Natuna Tahun 2009 – 2013 (Persen)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011*	2012**	2013***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1, PERTANIAN	**62,04**	**58,1**	**60,53**	**58,12**	**55,31**
a, Tanaman Bahan Makanan	3,53	3,41	2,77	2,65	2,72
b, Tanaman Perkebunan	4,86	2,08	1,79	1,73	1,65
c, Peternakan & Hasil- hasilnya	2,67	2,55	2,28	2,27	2,53
d, Kehutanan	1,66	1,58	1,32	1,24	1,13
e, Perikanan	49,32	48,49	52,37	50,22	47,28
2,PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**0,43**	**0,44**	**0,41**	**0,43**	**0,41**
a, Pertambangan	-	-	-	-	-
b, Penggalian	0,43	0,44	0,41	0,43	0,41
3, INDUSTRI PENGOLAHAN	**2,19**	**2,16**	**1,92**	**1,96**	**1,8**
4, LISTRIK & AIR MINUM	**0,1**	**0,13**	**0,08**	**0,11**	**0,12**
a, Listrik	0,05	0,08	0,04	0,06	0,06
b, Air Minum	0,05	0,05	0,04	0,05	0,06
5, BANGUNAN	**5,16**	**6,2**	**6,8**	**7,5**	**8**
6, PERDAGANGAN, HTL & REST,	**16,13**	**17,53**	**15,33**	**15,96**	**16,85**
a, Perdagangan Besar & Eceran	15,42	16,17	14,19	14,7	15,53
b, Hotel	0,1	0,35	0,37	0,45	0,46
c, Restoran & Rumah Makan	0,61	1,01	0,77	0,81	0,86
7, ANGKUTAN & KOMUNIKASI	**4,21**	**5,83**	**6,43**	**7,44**	**8,62**
a, Pengangkutan	4,12	4,55	5,38	6,37	7,5
1, Angkutan Darat	1,84	1,56	1,66	2,05	2,39
2, Angkatan Laut	1,99	1,96	1,95	2,02	2,13
3, Angkutan Udara	0,07	0,82	1,6	2,13	2,81
4, Jasa Penunjang Angkutan	0,22	0,2	0,18	0,17	0,16
b, Komunikasi	0,09	1,28	1,05	1,07	1,13
8, KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA	**2,89**	**2,97**	**2,67**	**2,64**	**2,86**
a,Bank	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
b,Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,11	0,17	0,19	0,18	0,19
c, Sewa Bangunan	2,77	2,77	2,45	2,43	2,63
d, Jasa Perusahaan	0	0,01	0,01	0,01	0,01
9, JASA - JASA	**6,85**	**6,64**	**5,82**	**5,83**	**6,04**
a, Pemerintahan Umum	5,31	5,21	4,61	4,63	4,87
b, Swasta	1,54	1,43	1,21	1,2	1,17
1, Sosial Kemasyarakatan	0,74	0,73	0,61	0,59	0,58
2, Hiburan dan Rekreasi	0,31	0,22	0,19	0,19	0,19
3, Perorangan & Rumah tangga	0,49	0,48	0,42	0,41	0,4
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : PDRB Kab. Natuna Tahun 2014

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sektor yang paling dominan dan berandil besar dalam PDRB Kabupaten Natuna adalah sektor pertanian dengan rata-rata dalam lima tahun terakhir 58,82% pertahun dengan kecenderungan yang semakin menurun. Dalam sektor pertanian, subsektor perikanan merupakan sektor unggulan yang memberi kontribusi terbesar. Peranan terbesar kedua setelah sektor pertanian dalam hal penciptaan nilai tambah di Kabupaten ini adalah sektor perdagangan dengan *share* rata-rata 16,8 persen pertahun dengan kecenderungan yang semakin meningkat. pertahun. Subsektor perdagangan besar dan eceran merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah di sektor ini. Sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor bangunan/konstruksi mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menjadi sektor dengan peranan terbesar ketiga pada tahun 2013 dengan 8,62 persen. Hal ini tidak lepas dari adanya program pemerintah daerah yang mencoba untuk melengkapi infrastruktur sarana dan prasarana daerah, seperti pembangunan jalan dan jembatan juga pembangunan lainnya. Dan kontribusi sektor terkecil di Kabupaten Natuna masih di sektor listrik, gas, dan air bersih yang hanya memiliki *share* rata-rata 0,11 persen pertahun. Nilai PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah bruto yang di ciptakan oleh setiap penduduk di suatu daerah sebagai akibat adanya proses produksi dalam rangkaian kegiatan ekonomi. Sementara itu pendapatan regional perkapita memberikan gambaran mengenai pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai balas jasa keikutsertaannya dalam proses produksi. Besaran ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Kedua indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat peningkatan dalam pendistribusian PDRB per kapita maupun pendapatan regional per kapita. Salah satu tujuan tingkat kemakmuran dalam pencapaian pembangunan nasional dan regional adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan

meningkatnya daya beli masyarakat yang disertai dengan pengurangan tingkat penggurangan dan tingkat kemiskinan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan juga perbaikan derajat kesehatan, sehingga dapat tercapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. PDRB dan pendapatan regional perkapita menjadi salah satu tolak ukur dalam pencapaian tingkat kemakmuran rakyat tersebut.

3.2. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Untuk tahun 2011 sampai dengan 2016, pengelolaan keuangan daerah masih sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, terutama dalam hal pendapatan daerah yang sangat besar peranannya dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan dalam kurun waktu tersebut. Dengan terbitnya Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tentu memberikan warna baru dalam menentukan kerangka pendanaan dalam rencana kinerja pembangunan Kabupaten Natuna periode tahun 2011-2016. Dengan undang-undang tersebut yang nantinya diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, diharapkan ketergantungan Kabupaten Natuna dari dana pusat semakin berkurang yang artinya Kabupaten Natuna dapat lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan.

Derajat otonomi fiskal daerah sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Perkembangan DOFD Kabupaten Natuna periode tahun 2010-2014, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. T-III.4
Derajad Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Natuna 2010-2014

Tahun	PAD (Rp)	APBD	DOFD (%)
2010	20.369.000.000	1.115.737.906.375,60	1,83
2011	35.351.000.000	1.528.858.449.000,00	2,31
2012	26.583.613.872	1.714.814.079.999,30	1,55
2013	37.728.550.218	1.530.439.419.190,42	2,47
2014	40.707.866.476	1.386.905.857.213,26	2,94
Rata-Rata	32.148.006.113,20	1.455.351.142.355,72	2,21

Sumber : BPKAD Kab. Natuna, Perhitungan APBD Kab. Natuna, 2015 (diolah)

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Natuna dapat meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut akan berimplikasi menurunnya terjadinya ketergantungan yang tinggi Kabupaten Natuna terhadap dana dari pusat baik berupa DAU, DAK maupun dana bagi hasil dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Laju penambahan PAD tidak sebanding dengan laju penambahan dana transfer dari pusat berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk membiayai sisi pengeluaran pada APBD.

3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 perkembangan APBD Kabupaten Natuna mengalami perubahan yang cukup berarti. Ini dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kabupaten Natuna dan pertumbuhan tahunan dan rata-rata dari masing-masing jenis pendapatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. T-III.5
PERKEMBANGAN APBD DAN REALISASI APBD KABUPATEN NATUNA, 2010-2014

URAIAN	2010		2011		2012		2013		2014	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan	839.990.694.959,00	1.144.851.482.216,24	1.046.257.135.407,99	1.152.242.437.228,29	1.391.230.515.932,00	1.284.338.932.310,66	1.391.315.851.035,00	1.310.672.135.494,32	1.274.704.000.000,00	1.156.376.995.189,03
Belanja	1.115.737.906.375,60	945.389.100.040,83	1.528.858.449.000,00	1.311.260.186.753,00	1.714.814.079.999,30	1.452.282.628.376,54	1.530.439.419.190,42	1.342.567.501.307,48	1.386.905.857.213,26	1.258.454.597.574,19
Surplus (Defisit)	**(275.747.211.416,60)**	**199.462.382.175,41**	**(482.601.313.592,01)**	**(159.017.749.524,71)**	**(323.583.564.067,30)**	**(167.943.696.065,88)**	**(139.123.568.155,42)**	**(31.895.365.813,16)**	**(112.201.857.213,26)**	**(102.077.602.385,16)**
Penerimaan Pembiayaan	300.747.211.416,60	301.293.531.416,60	482.601.313.592,01	482.601.313.592,01	323.583.564.067,30	315.067.264.221,30	147.123.568.155,42	147.096.446.413,42	112.201.857.213,26	112.201.080.600,26
Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	18.154.600.000,00	-	-	-	-	8.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-
Pembiayaan Netto	**275.747.211.416,60**	**283.138.931.416,60**	**482.601.313.592,01**	**482.601.313.592,01**	**323.583.564.067,30**	**315.067.264.221,30**	**139.123.568.155,42**	**144.096.446.413,42**	**-**	**-**
SILPA	**-**	**482.601.313.592,01**	**-**	**323.583.564.067,30**	**-**	**147.123.568.155,42**	**-**	**112.201.080.600,26**	**-**	**10.123.478.215,10**

Sumber :BPKAD Kab. Natuna, Perhitungan APBD, 2015

Tabel. T-III.6
PERTUMBUHAN APBD KABUPATEN NATUNA, 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
Pendapatan	839.990.694.959,00	1.046.257.135.407,99	1.391.230.515.932,00	1.391.315.851.035,00	1.274.074.000.000,00	1.188.699.639.466,80
Belanja	1.115.737.906.375,60	1.528.858.449.000,00	1.714.814.079.999,30	1.530.439.419.190,42	1.386.905.857.213,26	1.455.351.142.355,60
Penerimaan Pembiayaan	300.747.211.416,60	482.601.313.592,01	323.583.564.067,30	147.123.568.155,42	112.201.857.213,26	273.251.502.888.92

Sumber :BPKAD Kab. Natuna, 2015

Tabel. T-III.7
PERKEMBANGAN ANGGARAN DAN REALISASI PENERIMAAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010-2014

URAIAN	2010		2011		2012		2013		2014	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	**839.990.694.959,00**	**1.144.851.482.216,24**	**1.046.257.135.407,99**	**1.152.242.437.228,29**	**1.391.230.515.932,00**	**1.284.338.932.310,66**	**1.391.315.851.035,00**	**1.310.672.135.494,32**	**1.274.704.000.000,00**	**1.1156.376.995.189,03**
A. Pendapatan Asli Daerah	**20.369.000.000,00**	**34.106.892.517,97**	**35.351.000.000,00**	**42.186.498.863,15**	**26.583.613.872,00**	**38.920.353.032,66**	**37.728.550.218,00**	**41.890.798.570,43**	**40.707.866.476,00**	**38.252.967.509,99**
Pajak	**2.788.000.000,00**	**1.023.194.709,00**	**2.929.000.000,00**	**1.470.265.474,55**	**3.139.400.000,00**	**3.407.199.890,00**	**4.021.660.000,00**	**9.975.217.129,00**	**8.267.000.000,00**	**6.812.492.330,85**
- Pajak Hotel dan Restoran	85.000.000,00	220.309.300,00	155.000.000,00	410.552.335,00	115.500.000,00	2.122.236.035,00	1.377.660.000,00	2.842.614.533,00	1.970.000.000,00	2.821.708.875,85
- Pajak Hiburan	3.000.000,00	150.000,00	3.000.000,00	550.000,00	3.300.000,00	400.000,00	5.000.000,00	75.428.050,00	72.000.000.000,00	77.046.600,00
- Pajak Reklame	110.000.000,00	111.648.620,00	110.000.000,00	9.131.000,00	121.000.000,00	24.708.680,00	60.500.000,00	30.059.136,00	15.000.000.000,00	39.726.000,00
- Pajak Penerangan Jalan	2.500.000.000,00	576.990.145,00	2.300.000.000,00	1.008.179.495,00	2.310.000.000,00	1.177.752.723,00	2.450.000.000,00	6.836.831.275,00	3.950.000.000,00	2.722.184.481,00
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C	90.000.000,00	114.096.644,00	80.000.000,00	5.881.694,55	88.000.000,00	905.200,00	40.000.000,00	-	-	-
- Pajak Parkir	-	-	50.000.000,00	-	55.000.000,00	-	25.000.000,00	11.640.000,00	35.000.000,00	3.000.000,00
- Pajak Air Bawah Tanah	-	-	1.000.000,00	-	1.100.000,00	3.770.000,00	2.500.000,00	4.770.000,00	5.000.000,00	5.140.000,00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00	83.250.000,00
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000.000,00	802.355.056,00
- Pajak Sarang Burung Walet	-	-	30.000.000,00	-	11.000.000,00	-	11.000.000,00	-	-	-
- Pajak BPHTB	-	-	200.000.000,00	35.970.950,00	434.500.000,00	77.427.252,00	50.000.000,00	173.874.135,00	220.000.000,00	258.081.318,00
RETRIBUSI	1.531.000.000,00	4.835.276.985,74	3.247.000.000,00	2.562.551.206,00	542.300.000,00	1.405.183.687,00	661.850.000,00	624.467.317,00	1.074.715.000,00	1.150.914.983,00
Laba Penyertaan Modal pada BUMD	4.550.000.000,00	4.689.282.356,00	175.000.000,00	4.179.743.366,00	110.000.000,00	-	3.900.000.000,00	3.871.745.269,00	4.815.302.095,00	4.815.302.095,00
Laba Penyertaan Modal pada PMS	-	-	4.500.000.000,00	-	4.960.000.000,00	3.837.256.499,00	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	11.500.000.000,00	23.559.138.467,23	24.500.000.000,00	33.973.938.816,60	17.841.913.872,00	30.270.712.956,66	29.145.040.218,00	27.419.368.855,43	26.550.849.381,00	25.474.258.101,14
B. DANA PERIMBANGAN	**642.618.281.159,00**	**944.118.866.996,00**	**956.423.095.100,99**	**1.043.134.708.918,00**	**1.292.922.961.507,00**	**1.175.509.507.588,00**	**1.289.883.345.440,00**	**1.189.088.858.540,00**	**1.085.295.263.671,05**	**1.019.680.093.777,00**

Bagi Hasil Pajak Pusat	16.640.310.000,00	60.763.129.606,00	154.588.713.000,00	217.897.344.434,00	224.030.683.842,00	180.501.533.620,00	152.234.656.161,00	171.306.717.805,00	200.918.228.238,05	162.928.086.487,00
Bagi Hasil SDA	601.189.171.159,00	862.733.312.390,00	693.609.545.100,99	726.098.927.484,00	947.984.965.665,00	874.100.661.968,00	884.939.517.279,00	765.072.968.735,00	620.588.965.433,00	592.963.937.290,00
DAU	-	-	71.909.237.000,00	71.909.237.000,00	85.322.702.000,00	85.322.702.000,00	177.949.262.000,00	177.949.262.000,00	187.950.770.000,00	187.950.770.000,00
DAK	24.788.800.000,00	20.622.425.000,00	36.315.600.000,00	27.229.200.000,00	35.584.610.000,00	35.584.610.000,00	74.759.910.000,00	74.759.910.000,00	75.837.300.000,00	75.837.300.000,00
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**177.003.413.800,00**	**166.625.722.702,27**	**54.483.040.307,00**	**66.921.229.447,14**	**71.723.940.553,00**	**69.909.071.690,00**	**63.703.955.377,00**	**79.692.478.383,89**	**148.700.869.852,95**	**98.443.933.902,04**
Bagi Hasil Pajak Provinsi	163.128.747.000,00	162.372.313.664,27	25.080.344.000,00	23.508.736.848,14	29.274.950.872,00	27.524.145.487,00	27.990.004.886,00	43.522.288.901,89	53.475.309.244,69	20.943.224.338,86
Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah Pusat	13.874.666.800,00	4.168.366.800,00	4.855.425.000,00	17.588.332.600,00	12.747.659.600,00	12.475.919.000,00	14.391.609.000,00	14.391.609.000,00	-	-
Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah Provinsi	-	-	24.547.271.307,00	25.824.159.999,00	29.701.330.081,00	29.701.330.081,00	21.322.341.491,00	21.322.341.492,00	23.810.469.208,00	23.810.469.208,00
Hibah dari Pemerintah Pusat	-	85.042.238,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-	-	207.677.122,00	-	456.238.990,00	71.415.091.400,26	53.690.240.355,18
SILPA	**-**	**482.601.313.592,01**	**-**	**323.583.564.067,30**	**-**	**147.123.568.155,42**	**-**	**112.201.080.600,26**	**-**	**10.123.478.215,10**

Sumber : BPKAD Kab. Natuna 2015

Tabel. T-III.8
PERTUMBUHAN TAHUNAN DAN RATA-RATA PENERIMAAN
KABUPATEN NATUNA, 2010-2014

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	
PENDAPATAN	**841.404.887.621,17**	**839.990.694.959,00**	**1.046.257.135.407,99**	**1.391.230.515.932,00**	**1.391.315.851.035,00**	
A. **Pendapatan Asli Daerah**	**17.823.431.000,00**	**20.369.000.000,00**	**35.351.000.000,00**	**26.583.613.872,00**	**37.728.550.218,00**	
Pajak	**3.607.000.000,00**	**2.788.000.000,00**	**2.929.000.000,00**	**3.139.400.000,00**	**4.021.660.000,00**	
- Pajak Hotel dan Restoran	45.000.000,00	85.000.000,00	155.000.000,00	115.500.000,00	1.377.660.000,00	
- Pajak Hiburan	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	5.000.000,00	
- Pajak Reklame	100.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	121.000.000,00	60.500.000,00	
- Pajak Penerangan Jalan	3.400.000.000,00	2.500.000.000,00	2.300.000.000,00	2.310.000.000,00	2.450.000.000,00	
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C	60.000.000,00	90.000.000,00	80.000.000,00	88.000.000,00	40.000.000,00	
- Pajak Parkir	-	-	50.000.000,00	55.000.000,00	25.000.000,00	
- Pajak Air Bawah Tanah	-	-	1.000.000,00	1.100.000,00	2.500.000,00	
- Pajak Sarang Burung Walet	-	-	30.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
- Pajak BPHTB	-	-	200.000.000,00	434.500.000,00	50.000.000,00	
RETRIBUSI	240.500.000,00	1.531.000.000,00	3.247.000.000,00	542.300.000,00	661.850.000,00	
Laba Penyertaan Modal pada BUMD	5.000.000.000,00	4.550.000.000,00	4.675.000.000,00	5.060.000.000,00	3.900.000.000,00	
Lain-lain PAD yang Sah	8.975.931.000,00	11.500.000.000,00	24.500.000.000,00	17.841.913.872,00	29.145.040.218,00	
B. **DANA PERIMBANGAN**	**813.201.456.621,17**	**642.618.281.159,00**	**956.423.095.100,99**	**1.292.922.961.507,00**	**1.289.883.345.440,00**	
Bagi Hasil Pajak Pusat	149.838.366.656,00	16.640.310.000,00	154.588.713.000,00	224.030.683.842,00	152.234.656.161,00	
Bagi Hasil SDA	534.103.949.965,17	601.189.171.159,00	693.609.545.100,99	947.984.965.665,00	884.939.517.279,00	
DAU	90.285.140.000,00	-	71.909.237.000,00	85.322.702.000,00	177.949.262.000,00	
DAK	38.974.000.000,00	24.788.800.000,00	36.315.600.000,00	35.584.610.000,00	74.759.910.000,00	

C.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**10.380.000.000,00**	**177.003.413.800,00**	**54.483.040.307,00**	**71.723.940.553,00**	**63.703.955.377,00**	
	Bagi Hasil Pajak Provinsi	10.380.000.000,00	163.128.747.000,00	25.080.344.000,00	29.274.950.872,00	27.990.004.886,00	
	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah Pusat	-	13.874.666.800,00	4.855.425.000,00	12.747.659.600,00	14.391.609.000,00	
	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah Provinsi	-	-	24.547.271.307,00	29.701.330.081,00	21.322.341.491,00	
	Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-	-	
	SILPA		**-**	**-**	**-**	**-**	

Sumber : BPKAD Kab. Natuna, 2015

Tabel. T-III.9
PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAERAH
KABUPATEN NATUNA, 2012-2014

No.	Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)
1	Belanja Pegawai	233.150.350.599,00	248.612.920.427,00	278.574.085.644,00
2	Belanja Bunga	-	-	-
3	Belanja Subsidi	80.492.539.930,00	46.656.240.628,90	53.784.038.443,85
4	Belanja Hibah	188.099.322.500,00	73.889.076.750,00	40.751.500.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	121.423.202.000,00	146.572.948.000,00	79.415.840.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	38.323.919.270,00	38.547.238.940,00	38.090.251.000,00
7	Belanja Tidak Terduga	577.033.973,00	-	-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung	**662.066.368.272,00**	**554.278.424.745,90**	**490.615.715.087,85**

Sumber: BPKAD Kab. Natuna, 2015

3.2.2. Neraca Daerah

Neraca Kabupaten Natuna periode tahun 2010 sampai dengan periode tahun 2012 mengalami perkembangan yang sangat baik, seiring dengan perkembangan APBD Kabupaten Natuna pada periode tersebut, terutama terkait dengan belanja Kabupaten Natuna.

Tabel. T-III.10
Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Natuna, 2012-2014

No.	Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)
1	ASSET			
	ASSET LANCAR			
	Kas di Kas Daerah	83.347.777.239,35	62.348.289.074,29	13.811.183.932,77
	Kas di BLUD RSUD	3.721.482.973,07	9.852.073.525,97	6.355.053.965,33
	Kas JKN FKTP	-	-	128.339.166,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	31.677.691,00	718.000,00	5.560.621,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
	Investasi Jangka Pendek	60.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-
	Piutang Pajak	6.790.159,00	4.293.000,00	6.156.170.929,00
	Piutang Retribusi	442.785.237,50	-	-
	Piutang Lainnya	9.595.548.595,00	1.701.357.118,00	9.242.995.091,00
	Persediaan	11.507.146.708,77	13.093.862.547,00	22.126.483.095,83
	Jumlah Aset Lancar	**168.653.208.603,69**	**127.000.593.265,26**	**57.825.786.800,93**
	INVESTASI JANGKA PANJANG			
	Investasi Non-Permanen			
	Investasi Non Permanen Lainnya	31.746.769.574,00	13.563.246.425,15	7.076.898.415,50
	Jumlah Investasi Non Permanen	**31.746.769.574,00**	**13.563.246.425,15**	**7.076.898.415,50**
	Investasi Permanen			
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	66.088.687.777,27	70.068.005.042,11	67.982.993.824,00
	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	**66.088.687.777,27**	**70.068.005.042,11**	**67.982.993.824,00**
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**97.835.457.351,27**	**83.631.251.467,26**	**75.059.892.239,50**
	ASET TETAP			
	Tanah	372.298.907.594,00	338.245.278.888,00	312.472.933.738,00
	Peralatan dan Mesin	496.285.228.847,18	523.028.431.082,66	424.130.367.648,38
	Gedung dan Bangunan	1.007.251.862.370,28	997.146.553.978,04	1.057.484.918.363.04
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.034.889.163.690,00	1.101.560.601.325,08	1.234.832.277.220,64
	Aset Tetap Lainnya	27.253.586.697,00	35.554.259.848,00	37.475.828.708,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	95.815.109.897,84	142.623.364.506,17	205.268.835.212,00
	Akumulasi Penyusutan	-	-	-

	Jumlah Aset Tetap	**3.033.793.859.096,30**	**3.138.158.489.627,95**	**3.271.665.160.890,06**
	DANA CADANGAN			
	Dana Cadangan	-	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	**-**	**-**	**-**
	ASET LAINNYA			
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-
	Tuntutan Perbendaharaan	3.573.747.600,00	3.573.747.600,00	3.573.747.600,00
	Tuntutan Ganti Rugi	288.171.450,00	209.998.283,00	32.560.585,00
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
	Aset yang Tidak Berwujud	3.218.205.000,00	7.557.618.773,00	10.623.573.623,00
	Aset Lainnya (Jaminan Reklamasi)	-	1.064.801.943,00	1.403.930.324,00
	Jumlah Aset Lainnya	**7.080.124.050,00**	**12.406.166.599,00**	**15.633.812,132,00**
	JUMLAH ASET	**3.307.362.649.101,26**	**3.361.196.500.959,47**	**3.420.184.652.062,49**
2	KEWAJIBAN			
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.491.490,00	-	5.560.621,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	270.803.194,26	-	10.591.357.956,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**275.294.684,26**	**-**	**10.596.918.577,00**
3	EKUITAS DANA			
	EKUITAS DANA LANCAR			
	Sisa Pembiayaan Anggaran (SILPA)	147.096.446.413,42	112.201.080.600,26	20.294.577.064,10
	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-	-
	Cadangan Piutang	10.045.123.991,50	1.705.650.118,00	15.399.166.020.00
	Cadangan Persediaan	11.507.146.708,77	13.093.862.547,00	22.126.483.095.83
	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(270.803.194,26)	-	(10.591.357.956,00)
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	**168.377.913.919,43**	**127.000.593.265,26**	**47.228.868.223,93**
	EKUITAS DANA INVESTASI			
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	97.835.457.351,27	83.631.251.467,26	75.059.892.239,50
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	3.033.793.859.096,30	3.138.158.489.627,95	3.271.665.160.890,06
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	7.080.124.050,00	12.406.166.599,00	15.633.812.132,00
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	**3.138.709.440.497,57**	**3.234.195.907.694,21**	**3.362.358.865.261,56**
	JUMLAH EKUITAS DANA	**3.307.087.354.417,00**	**3.361.196.500.959,47**	**3.409.587.733.485,49**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3.307.362.649.101,26**	**3.361.196.500.959,47**	**3.420.184.652.062,49**

Sumber : BPKAD Kab. Natuna, 2015

3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam kurun waktu tahun 2005-2009, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2007

sampai dengan Tahun 2009, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut bertanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing SKPD.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kabupaten Natuna dapat dikatakan belum berhasil. Ini dapat dilihat dari hasil opini audit BPK Kabupaten Natuna sebagai berikut:

Tabel. T-III.11
OPINI BPK TERHADAP LKD
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010-2014

TAHUN	OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
2010	WDP
2011	WDP
2012	WDP
2013	WDP
2014	Unaudit

Sumber : BPKAD Kab. Natuna, 2015

3.3.1 Analisis Pembiayaan

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pertahunnya. SILPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya, dikar enakan kurang baik untuk perekonomian makro Kabupaten Natuna, yang menggambarkan belanja pemerintah kurang diberdayakan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga belanja pemerintah tidak dapat secara optimal menggerakkan pertumbuhan

ekonomi. Perkembangan SILPA pertahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. T-III.12
SILPA Kabupaten Natuna, 2010-2014

Tahun	SILPA (Rp)
2010	482.601.313.592,01
2011	323.583.564.067,30
2012	147.123.568.155,42
2013	112.201.080.600,26
2014	10.123.478.215,10

Sumber: BPKAD Kab. Natuna, Perhitungan APBD, 2015

Perkembangan prosentase SILPA yang digunakan untuk membiayai belanja Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. T-III.13
PROSENTASE SILPA
KABUPATEN NATUNA UNTUK PENDANAAN APBD TAHUN 2010-2014

Tahun	SILPA (Rp)	Pengeluaran APBD (Rp)
2010	482.601.313.592,01	963.543.700.040,83
2011	323.583.564.067,30	1.311.260.186.753,00
2012	147.123.568.155,42	1.452.282.628.376,54
2013	112.201.080.600,26	1.342.567.501.307,48
2014	10.123.478.215,10	1.258.454.597.574,19

Sumber :BPKAD Kab. Natuna, APBD, 2015

3.4. Kerangka Pendanaan

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2015 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2010-2014),

maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2015. Berdasarkan potensi pendanaan, Kabupaten Natuna mempunyai potensi pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah, walaupun masih relatif kecil dan juga didukung oleh Dana Perimbangan yang menjanjikan serta bagi hasil migas yang sangat besar.

3.4.1 Proyeksi Data Masa Lalu

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah daya pajak (*tax effort*). Daya pajak merupakan perbandingan PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan potensi PAD yaitu pendapatan yang diterima apabila seluruh potensi digunakan secara optimal, dalam hal ini PDRB. Perkembangan daya pajak (*tax effort*) Kabupaten Natuna periode tahun 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. T-III.14
DAYA PAJAK (*TAX EFFORT*) KABUPATEN NATUNA, 2010-2014

Tahun	PAD (dalam ribu rupiah)	PDRB atas harga berlaku (dalam juta rupiah)
2010	20.369.000.000	1.079.877
2011	35.351.000.000	1.334.813
2012	26.583.613.872	1.469.359
2013	37.728.550.218	1.691.578
2014	40.707.866.476	1.941.574
Rata-rata	32.148.006.113,20	1.503.440,20

Sumber: BPS Kab. NATUNA, DPPKA Kab. NATUNA (diolah)

3.4.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan memperhatikan kerangka penerimaan dan kerangka belanja, sebagai dasar penghitungan kapasitas riil pengelolaan keuangan daerah.

a. Kerangka Penerimaan

Sesuai dengan analisis-analisis diatas dapat diestimasi kerangka pendanaan Kabupaten Natuna pada tahun 2016. Pendanaan tersebut terbagi kedalam jenis-jenis pendapatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel. T-III.15
ESTIMASI PENERIMAAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016

URAIAN	2016
PENDAPATAN DAERAH	**1.153.000.000.000**
Pendapatan Asli Daerah	**40.432.395.879**
Hasil Pajak Daerah	5.035.000.000
Hasil Retribusi Daerah	555.000.0000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.000.000.000
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan	29.842.395.879
Dana Perimbangan	**1.046.800.181.058**
Bagi Hasil Pajak	122.266.829.441
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	637.514.566.445
Dana Alokasi Umum	211.181.485.171
Dana Alokasi Khusus	75.837.300.000
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	**65.767.423.063**
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	39.706.953.855
Dana Penyesuaian Otonomi Daerah	2.250.000.000
Dana Bantuan Dari Propinsi	23.810.469.208

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna

b. Kerangka Belanja

Untuk menentukan kerangka belanja tidak langsung ini, perlu mngetahui proyeksi jumlah pegawai negeri sipil (PNS/CPNS) dan jumlah pegawai tidak tetap (PTT) selama 5 tahun perencanaan. Perkiraan jumlah PNS/CPNS dan PTT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T-III.16
PERKIRAAN JUMLAH PEGAWAI KABUPATEN NATUNA 2016

	2016
PNS	3124
PTT	3240
JUMLAH	6364

BKD Kab. Natuna 2015

Dari data-data diatas, dapat dilakukan perhitungan, bahwa perkiraan belanja gaji dan tunjangan untuk PNS/CPNS Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Tabel. T-III.17
PERKIRAAN BELANJA PEGAWAI KABUPATEN NATUNA 2016

	2016
Prediksi Gaji dan Tunjangan PNS	309.142.320

Sumber: BKD Kab. Natuna 2015

Dari perkiraan belanja gaji dan tunjangan tersebut dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Natuna, kapasitas riil adalah dimana dana yang teredia untuk melaksanakan pembangunan yang penghitunganya adalah total penerimaan dikurangi belanja gaji dan tunjangan serta belanja wajib dan mengingkat. Adapun tabel berikut menunjukkan kapasitas riil ataupun dana yang tersedia setiap tahunnya untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Natuna.

Tabel. T-III.18
PERKIRAAN KAPASITAS RIIL
KABUPATEN NATUNATAHUN 2016

URAIAN	2016
Total Penerimaan (Dana Tersedia)	**1.153.000.000.000**
Jumlah Belanja Gaji & Tujangan PNS	309.142.320.594
Belanja wajib dan mengikat	273.693.665.573
Kapasitas Riil	570.164.013.000

Sumber : Bappeda Kab. Natuna 2015

Dari dana yang tersedia tersebut, dapat diambil pendekatan penggunaan dana yang tersedia dengan pendekatan prioritas penggunaan dana, dimana ada 3 (tiga) prioritas penggunaan dana yaitu:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk program pembangunan daerah yang terkait langsung dengan Visi dan Misi Bupati.
2. Prioritas II, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk program penyelenggaraan urusan lainnya.

Tabel. T-III.19
PENDANAAN PRIORITAS
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016

Uraian	2016
Prioritas I	**246.021.425.683**
Prioritas II	**324.142.588.150**
JUMLAH	**570.164.013.833**

Sumber : BAPPEDA Kab. Natuna (diolah)

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan suatu program dan kegiatan yang merupakan prioritas utama karena program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran tiap tahun program prioritas pembangunan di RPJMD untuk mencapai visi dan misi dari kepala daerah. Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Prioritas dan sasaran pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis da masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional serta rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan perikraan maju pada RKPD tahun sebelumnya

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Natuna, yaitu:

1) **Meningkatkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan.**

Pemanfaatan ruang untuk pembangunan adalah bahwa pembangunan yang akan dilakukan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Untuk mencapai pemanfaatan ruang untuk pembangunan, maka sasarannya sebagai berikut:

a. Terciptanya aktivitas pembangunan yang sesuai dengan potensi dan karateristik wilayah

2) **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infastruktur dasar**

Infastruktur dasar terdiri dari transportasi, komunikasi, energi, dan air bersih. Peningkatan kualitas memiliki arti memperbaiki kondisi eksisting yang sudah terbangun sehingga menjadi layak digunakan oleh masyarakat, sesuai standar yang berlaku. Sementara peningkatan kuantitas memiliki arti menambah jumlah yang sudah ada sehingga dapat menjangkau dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, maka sasarannya adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya infastruktur transportasi, listrik, komunikasi, dan air bersih menuju pemukiman penduduk dan pusat ekonomi.

3) **Meningkatkan kualitas pendidikan**

Pendidikan merupakan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Natuna karena pendidikan merupakan *intangible asset* yang akan dimiliki oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, maka sasarannya sebagai berikut:

a. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata;
b. Meningkatnya kualitas lulusan; dan
c. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik.

4) **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan layanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesehatanjuga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memilikiperan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, maka sasarannya adalah:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

5) **Mewujudkan masyarakat yang produktif dan berkesetaraan gender**

Masyarakat yang memiliki keterampilan kerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Disadari bahwa tenaga kerja dan para pencari kerja yang ada memiliki jenis dan kualitas kemampuan dan keterampilan yang tidak sama. Kualitas tenaga kerja harus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga mampu mendukung pembangunan pertanian, industri, perdagangan, perhubungan, pariwisata dan sumberdaya lokal lainnya, menjadi usaha yang efisien dan mandiri. Dengan demikian, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan makin berperan dalam

penyediaan barang dan jasa baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Di dalam pembangunan sumber daya manusia akhir-akhir ini, isu keadilan dan kesetaraan gender menjadi hal yang penting. Dalam dunia kerja, partisipasi dalam pembangunan, aktivitas ekonomi dan aspek lainnya, diharapkan terjadi kesetaraan gender. Dalam lima tahun kedepan, Natuna diharapkan dapat mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan, yang melibatkan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan masyarakat yang produktif dan berkesetaraan gender, maka sasarannya adalah:

a. Terciptanya tenaga kerja yang kompeten dan produktif; dan
b. Terselenggaranya pembangunan yang berkesetaraan gender.

6) **Meningkatkan kualitas kehidupan beragama**

Pembangunan sumber daya manusia tidak saja dari sisi jasmaniah namun juga dari sisi rohani. Hal ini tentu saja menjadi perhatian dalam pembangunan di Kabupaten Natuna. Kerukunan hidup umat beragama di dalam suatu wilayah memberikandampak yang positif bagi pembangunan. Kualitas sumber daya manusia tidak saja ditentukan oleh kualitas pendidikan dan kesehatan yang dimilikinya, namun juga harus diimbangi dengan pertumbuhan di dalam iman dan taqwa. Dengan bekal ketiga aspek ini, maka seorang manusia diharapkan memiliki kualitas hidup yang baik dan mampu menghargai keragaman atau perbedaan yang ada di masyarakat.

Untuk mencapai tujuan Mencipt, berkesetaraan gender akan kerukunan hidup umat beragama, maka sasarannya adalah:

a. Terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa.

7) **Menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan dan industri berbasis sumber daya alam**

Penguatan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan peningkatan daya usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi dengan meningkatkan kompetensi danjiwa kewirausahaan, pengembangan kemitraan untuk meningkatkan produktivitas dan mampu beradaptasi terhadap kebutuhan pasar dan memanfaatkan inovasi dan teknologi. Pengembangan industri berbasis kerakyatan diutamakan berbasis sumber daya alamkhususnya sektor/komoditas unggulanyang dimiliki oleh Kabupaten Natuna, seperti kelautan dan perikanan.

Untuk mencapai tujuan menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan dan industri berbasis sumber daya alam, maka sasarannya sebagai berikut:

a. Tercapainya optimalisasi sektor unggulan daerah;
b. Terwujudnya sentra-sentra ekonomi rakyat;
c. Berkembangnya industri berbasis SDA; dan
d. Terjaminnya distribusi dan pemasaran hasil pengelolaan industri.

8) **Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan memiliki kinerja prima**

Perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih tidak terlepas dari dukungan aparatur yang profesional. Pelayanan publik yang ditopang oleh aparatur yang profesional, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung etika dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diharapkan mampu mendukung jalannya penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang lebih baik dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan memiliki kinerja prima, maka sasarannya sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah; dan
b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan RPJMN 2015 – 2019 maka perlu pula menjadikan 9 arah pembangunan (Nawa Cita) ke dalam telaahan isu strategis daerah. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Di dalam 9 arah pembangunan diatas, beberapa hal penting yang menjadi isu strategis bagi Kabupaten Natuna sebagai kabupaten yang wilayahnya berupa kepulauan sekaligus berada di wilayah terluar dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah:

- penguatan kedaulatan maritim sebagai salah satu pelaksanaan arah pertama dari 9 arah pembangunan;
- pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia, dan kawasan perbatasan yang menjadi salah satu pelaksanaan dari arah ketiga dari 9 arah pembangunan;
- pemberantasan tindakan perikanan liar sebagai salah satu pelaksanaan dari arah keempat dari 9 arah pembangunan; serta arah pembangunan lainnya yang memiliki pengaruh terhadap arah pembangunan daerah.

Prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut menjadi fokus pembangunan baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu untuk mendorong pencapaian prioritas-prioritas tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten.

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 ini merupakan tema lanjutan dari RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 yang menekankan kepada Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar. Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2016 akan tetap dilaksanakan dalam kerangka konsep Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro Environment. Hal ini sejalan dengan strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Arah Kebijakan dan Strategi dalam kerangka konsep *Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro Environment*. Untuk itu arah kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten Natuna disejalankan dengan konsep tersebut. Untuk Konsep *Pro Growth* Kabupaten Natuna melakukan Penguatan Kelembagaan UMKM, Penerapan Manajemen Industri yang Terpadu dan Berkelanjutan, Peningkatan Produktifitas Sektor Unggulan, dalam hal ini sektor maritim dan pariwisata. Untuk Konsep *Pro Job* dilakukan dengan strategi Pengembangan Keterampilan dan Keahlian Tenaga Kerja dan Pencari Kerja. Untuk konsep *Pro Poor* melalui program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Untuk konsep *Pro Environment* dengan melakukan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.

4.2. Prioritas dan Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana, dan juga berdasarkan evaluasi dari pencapaian kinerja Kabupaten Natuna Tahun 2014. Selain itu juga mendukung 9 arah pembangunan (Nawa Cita pembangunan nasional.

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah (tingkat pemda) yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya *(performance maintenance)*.

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.

Pembangunan pada tahun 2016 diarahkan kepada upaya melanjutkan penguatan kualitas lulusan anak didik dan tenaga kerja, pengarusutamaan gender, serta keimanan dan taqwa masyarakat Natuna. Kualitas SDM yang baik, diharapkan nantinya mampu terserap pada industri berbasis SDA yang pengembangannya juga diprioritas pada tahun ini. Guna mendukung keberhasilan pengembangan industri tersebut, maka pemerintah memprioritaskan pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran hasil pengolahan industri.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rencana program dan kegiatan prioritas mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan dokumen RPJMD pada tahun berkenaan dan perkiraan maju satu tahun berikutnya. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Rencana program dan kegiatan prioritas RKPD Kabupaten Natuna tahun 2016 terlampir pada lampiran. 5.1.

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2016 merupakan operasionalisasi program yang telah disusun di RPJMD. RKPD ini juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD dan penyusunan KUA dan PPAS.

Untuk mengoperasionalisasikan program dan kegiatan yang ada di RKPD perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis (2) *Good Governance dan Clean Government* (3) konsistensi kebijakan pemerintah daerah (4) keberpihakan kepada rakyat (5) partisipasi aktif dari masyarakat, media massa, dan pihak swasta, serta (6) mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik.

Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Natuna diharapkan dapat mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai.

BUPATI NATUNA

ILYAS SABLI